



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULIANA HARIMURTI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 472424

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.295.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/72 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/110 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/104 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/534 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	238.500.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	299.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	404.074.354
F. HARTA LAINNYA	Rp.	24.000.000
Sub Total	Rp.	3.261.074.354



III. HUTANG

Rp. 65.905.902

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.195.168.452

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.